

**ANALISIS OPTIMALISASI APLIKASI SAKTI DALAM
MENDUKUNG AKURASI PERENCANAAN KERJA DAN
ANGGARAN PADA SUBBAGRENMIN POLDA JAWA
TENGAH**

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh:

Nafisah Hasna Athifa

NIM. 49402300006

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2026

**ANALISIS OPTIMALISASI APLIKASI SAKTI DALAM
MENDUKUNG AKURASI PERENCANAAN KERJA DAN
ANGGARAN PADA SUBBAGRENMIN POLDA JAWA
TENGAH**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya



Disusun Oleh:

Nafisah Hasna Athifa

NIM. 49402300006

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2026

PERNYATAAN ORISIANALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nafisah Hasna Athifa

NIM : 49402300006

Program Studi : DIII Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

“ANALISIS OPTIMALISASI APLIKASI SAKTI DALAM MENDUKUNG AKURASI PERENCANAAN KERJA DAN ANGGARAN PADA SUBBAGRENMIN POLDA JAWA TENGAH” merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 19 Januari 2026
Yang menyatakan,

A 10000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'BB246AJY019443278'.

Nafisah Hasna Athifa
NIM. 49402300006

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Nafisah Hasna Athifa

NIM : 49402300006

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : ANALISIS OPTIMALISASI APLIKASI SAKTI DALAM MENDUKUNG AKURASI PERENCANAAN KERJA DAN ANGGARAN PADA SUBBAGRENMIN POLDA JAWA TENGAH



NIK. 211415028

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Ini Diajukan Oleh :

Nama : Nafisah Hasna Athifa
NIM : 49402300006
Program Studi : DIII Akuntansi
Judul Tugas : ANALISIS OPTIMALISASI APLIKASI SAKTI DALAM
Akhir MENDEKUNG AKURASI PERENCANAAN KERJA DAN
ANGGARAN PADA SUBBAGRENMIN POLDA JAWA
TENGAH

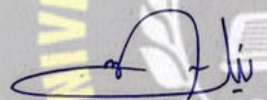
Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 16 Februari 2026

Menyetujui,

Penguji 1,

Penguji 2,



Naila Najihah, SE., M.Sc., Ak

NIK. 211418029



Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak

NIK. 211415028

Mengetahui,

Ketua Program Studi DIII Akuntansi



Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak

NIK. 211415028

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, Rahmat serta hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Optimalisasi Aplikasi Sakti Dalam Mendukung Akurasi Perencanaan Kerja Dan Anggaran Pada Subbagrenmin Polda Jawa Tengah”**.

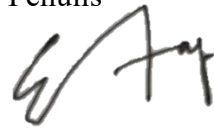
Penulisan Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Ahli Madya pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini tentunya banyak pihak yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak terima kasih serta apresiasi kepada:

1. Bapak Edy Mahrozi, Ibu Rokhayati, Saudara Naufal Mumtaz Nadhir yang telah memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang, nasehat dan membantu mendoakan selama berlangsungnya penyusunan laporan tugas akhir hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

5. Bapak Kompol Sutopo, S.E., M.Si. selaku kepala bidang Subbagrenmin Polda Jawa Tengah, yang telah memberikan izin dan kepercayaan kepada penulis selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di Subbagrenmin Polda Jawa Tengah.
6. Semua pegawai bidang keuangan Polda Jawa Tengah yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman.
7. Seluruh teman D-III Akuntansi 2023 selaku teman seperjuangan dalam berbagai suka, duka, dan informasi dalam keberhasilan penyusunan tugas akhir ini.
8. Teman seperjuanagn Iza Alfatiha, Putri Aulia, Intan Haula, dan Siti Isma Naulil yang telah membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan laporan ini.
9. Diri penulis sendiri yang sudah berjuang sampai titik ini dan tetap semangat dalam menjalankan Pendidikan hingga akhir.
10. Serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian penulisan Laporan Tugas Akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan pegetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis menerima seluruh kritik dan saran sehingga tugas akhir ini berguna bagi pembaca.

Semarang, 18 November 2025
Penulis



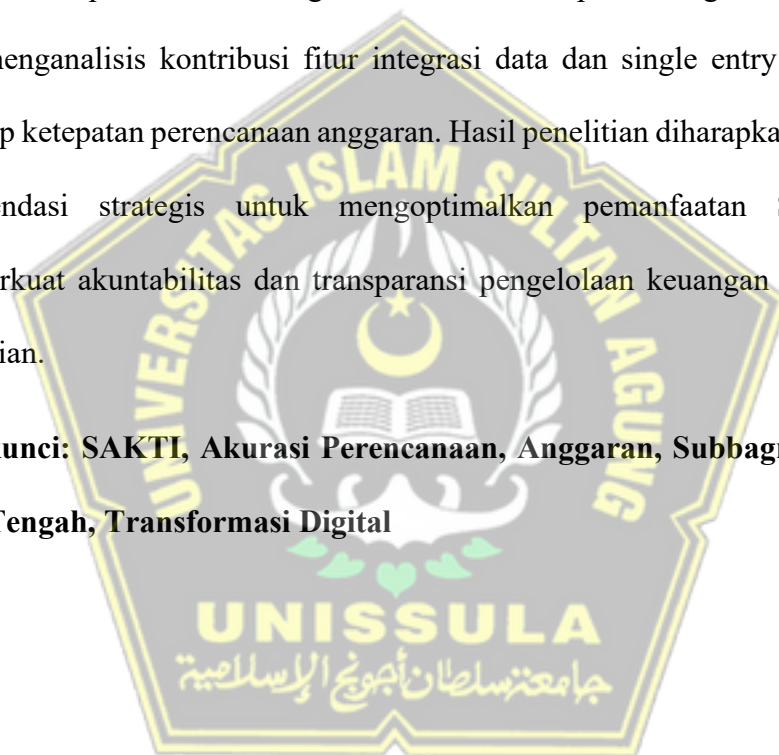
Nafisah Hasna Athifa



ABSTRAK

SAKTI merupakan aplikasi terintegrasi yang mendukung pengelolaan keuangan negara, mencakup tahapan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dalam satu database terpusat untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi. Studi menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi Pustaka untuk mengevaluasi efektivitas implementasi, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis kontribusi fitur integrasi data dan single entry point SAKTI terhadap ketepatan perencanaan anggaran. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan SAKTI guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan kepolisian.

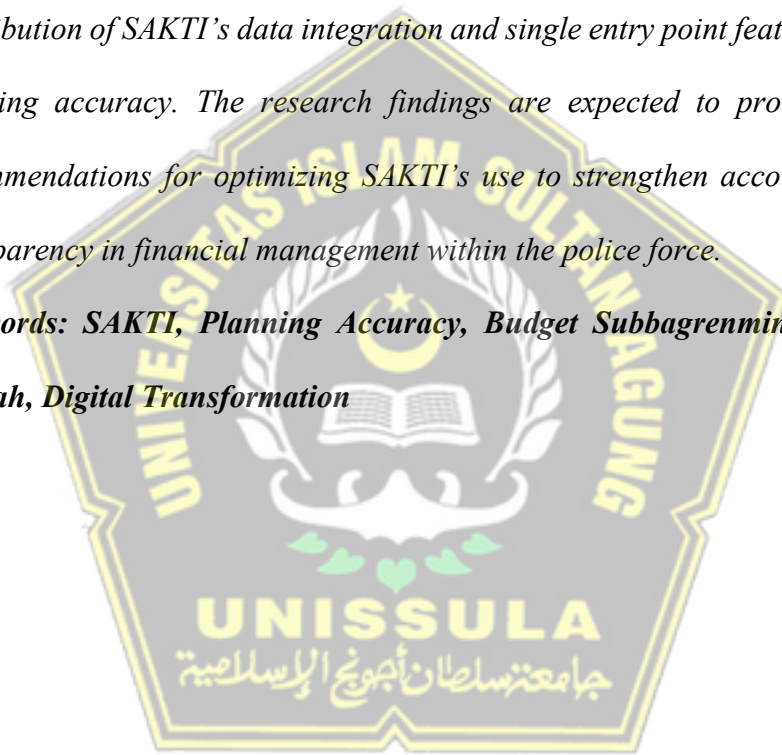
Kata kunci: SAKTI, Akurasi Perencanaan, Anggaran, Subbagrenmin Polda Jawa Tengah, Transformasi Digital



ABSTRACT

SAKTI is an integrated application that supports state financial management, encompassing stages from planning to budget accountability in a single, centralized database to improve effectiveness and accuracy. This study uses a qualitative case study approach, collecting data through observation, interviews, and literature review. This study evaluates implementation effectiveness, identifies supporting and inhibiting factors, and analyses the contribution of SAKTI's data integration and single entry point features to budget planning accuracy. The research findings are expected to provide strategic recommendations for optimizing SAKTI's use to strengthen accountability and transparency in financial management within the police force.

Keywords: SAKTI, Planning Accuracy, Budget Subbagrenmin Polda Jawa Tengah, Digital Transformation



DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISIANALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Aplikasi SAKTI.....	6
2.1.1 Definisi Aplikasi	6
2.1.2 Definisi SAKTI.....	7
2.2 Konsep Dasar Akurasi Perencanaan Anggaran	9
2.2.1 Akurasi.....	9
2.2.2 Perencanaan.....	10
2.2.3 Anggaran.....	11
2.2.4 Perencanaan anggaran.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Jenis Penelitian	13
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	13
3.2.1 Waktu	13
3.2.2 Tempat Penelitian.....	14
3.2.3 Objek penelitian	14
3.3 Metode Pengumpulan Data	14
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN	16

4.1	Gambaran Umum Instansi	16
4.1.1	Sejarah Singkat Polda Jawa Tengah.....	16
4.1.2	Visi dan Misi Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	18
4.1.3	Struktur Organisasi Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	19
4.2	Hasil Pengamatan	20
4.3	Pembahasan	21
4.3.1	Tahapan Perencanaan Kerja dan Anggaran.....	21
1.	Perencanaan dan penganggaran: Menyatukan kebutuhan dengan alokasi	21
2.	Pelaksanaan Anggaran: Kepatuhan dan Ketetapan Proses	22
3.	Penatausahaan: Administrasi Keuangan yang Terstruktur	24
4.	Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Transparansi yang Terbuka	26
4.3.2	Analisis Tahapan Perencanaan Kerja dan Anggaran dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Publik	28
4.3.3	Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi SAKTI	29
4.3.4	Analisis Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Optimalisasi Aplikasi SAKTI dalam Mendukung Akurasi	32
BAB V	PENUTUP	36
5.1	Kesimpulan.....	36
5.2	Keterbatasan	36
5.3	Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Polda Jawa Tengah.....	16
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Bidang Keuangan.....	20
Gambar 4. 3 Tahapan Perencanaan Kerja dan Anggaran	21
Gambar 4. 4 Tampilan Awal Aplikasi SAKTI	29



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kepolisian Resort (Polres)	17
Tabel 4. 2 Kelebihan Aplikasi SAKTI.....	29
Tabel 4. 3 Kelemahan Aplikasi SAKTI.....	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan	40
----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Tengah gelombang reformasi birokrasi dan revolusi digital 4.0, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin mendesak. Indonesia, melalui berbagai kebijakan transformatif, berusaha menjawab tantangan ini dengan melakukan modernisasi sistem keuangan negara. Salah satu terobosan signifikan adalah diluncurkannya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) oleh Kementerian Keuangan. SAKTI bukan sekadar aplikasi komputer biasa, melainkan sebuah platform transformatif yang dirancang untuk merevolusi seluruh proses bisnis keuangan negara dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan secara terintegrasi dan real time (Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-12/PB/2019).

Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan efisiensi, tetapi juga untuk memastikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kinerja dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara. Bagi Subbagrenmin di lingkungan Polda Jawa Tengah, yang notabene merupakan instansi penegak hukum dengan karakteristik belanja yang dinamis dan kritis, kehadiran SAKTI diharapkan dapat menjadi alat bantu strategis dalam memastikan akurasi dan ketepatan perencanaan anggaran. Akurasi dalam perencanaan anggaran merupakan fondasi utama bagi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam konteks kepolisian, ketidakakuratan anggaran dapat berimplikasi langsung pada terganggunya operasional, pemeliharaan aset, dan bahkan pelayanan kepada

Masyarakat. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diterbitkan oleh direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi alat ukur objektif bagi kinerja ini. Salah satu komponen penilaian IKPA adalah aspek kualitas perencanaan, yang di dalamnya mencakup indikator seperti revisi DIPA dan deviasi pada halaman III DIPA. Deviasi yang melebihi batas yang diterapkan serta seringnya dilakukan revisi DIPA menandakan adanya masalah dalam proses perencanaan awal. SAKTI, sebagai sistem inti, seharusnya mampu mendukung perencanaan yang solid. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi SAKTI untuk mendukung akurasi pada tahap yang paling fundamental ini masih menemui berbagai kendala.

Meski dirancang dengan canggih, implementasi SAKTI di berbagai instansi tidak luput dari berbagai hambatan. Bukti empiris dari berbagai instansi menunjukkan adanya faktor teknis dan non teknis yang menghambat optimalisasinya. Dari sisi teknis, gangguan performa aplikasi masih sering terjadi, seperti proses pendaftaran pengguna yang rumit menjadi penghalang besar. Data dari KPPN Jakarta VI mencatat bahwa dalam periode 2 Januari hingga 24 Maret 2025 saja, terdapat 573 tiket permohonan yang terkait dengan masalah pendaftaran pengguna, yang disebabkan oleh kesalahan format pengiriman data, pengisian NIK dan email yang tidak tepat, serta masalah verifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas sistem dapat memperlambat adopsi dan penggunaan yang lancar oleh operator di lapangan.

Di luar masalah teknis, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penghambat yang krusial. Penelitian di lingkungan TNI AL menemukan

bahwa kurangnya SDM yang professional dapat mengoperasikan SAKTI menyebabkan ketidaksesuaian dalam pencatatan data, termasuk data Barang Milik Negara (BMN). Temuan ini selaras dengan pernyataan bahwa SDM di satuan kerja harus memiliki pemahaman mendalam terhadap prose SAKTI dan mampu beradaptasi dengan cepat. Tantangan lain adalah kesiapan infrastruktur pendukung. Aplikasi SAKTI yang berbasis web memerlukan koneksi internet yang stabil dan baik, suatu hal yang biasa menjadi kendala signifikan bagi satuan kerja di wilayah yang memiliki cakupan jaringn terbatas. Kombinasi antara kemampuan SDM yang belum merata dan dukungan infrastruktur yang terbatas ini menciptakan lingkungan yang subur bagi terjadinya inefisiensi dan ketidakakuratan data, yang pada ujungnya merugikan proses perencanaan anggaran.

Berdasarkan pembahasan di atas, menjadi jelas bahwa terdapat kesenjangan (gap) antara potensi ideal aplikasi SAKTI sebagai pendukung akurasi perencanaan anggaran dengan realita implementasinya yang masih dipenuhi berbagai kendala multidimensi. Subbagrenmin Polda Jawa Tengah, sebagai unit yang bertanggung jawab atas penyusunan kerja dan anggaran yang credible di lingkungan Polda, sangat mungkin menghadapi tantangan-tantangan serupa, jika tidak identic. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam untuk menganalisis Optimalisasi Aplikasi Sakti Dalam Mendukung Akurasi Perencanaan Kerja Dan Anggaran Pada Subbagrenmin Polda Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja Tahapan-tahapan utama perencanaan kerja dan anggaran pada Subbagrenmin Polda Jawa Tengah?.
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Aplikasi SAKTI?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi optimalisasi aplikasi SAKTI dalam mendukung akurasi perencanaan kerja dan anggaran pada Subbagrenmin Polda Jawa Tengah?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pelaksanaan tahapan utama perencanaan kerja dan Anggaran pada Subbagrenmin Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Aplikasi SAKTI?
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi aplikasi SAKTI dalam mendukung akurasi perencanaan kerja dan anggaran pada Subbagrenmin Polda Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmiah mengenai faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penggunaan aplikasi

SAKTI, khususnya dalam konteks perencanaan kerja dan anggaran di instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Instansi

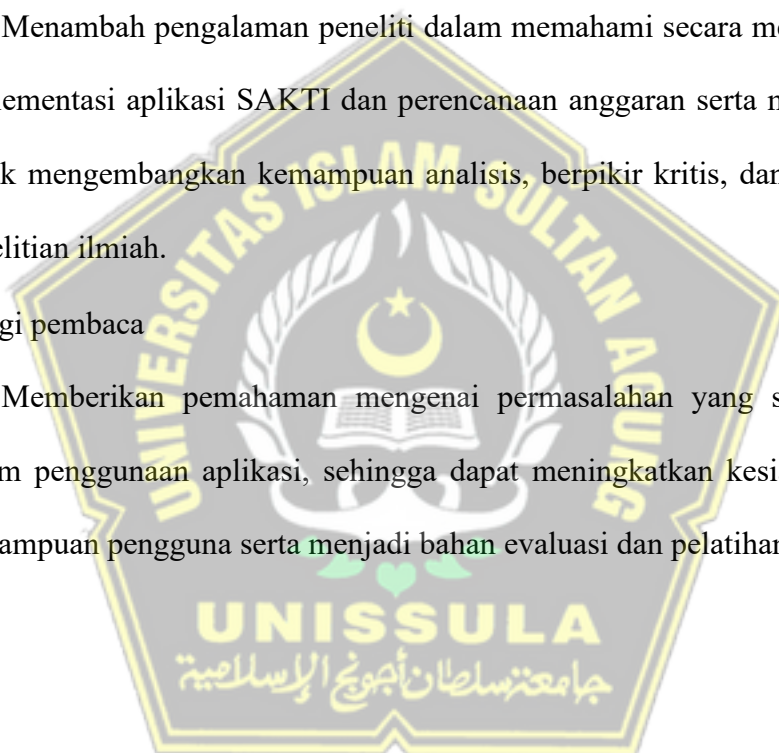
Memberikan Gambaran nyata mengenai kendala internal dan eksternal yang menghambat optimalisasi aplikasi SAKTI.

- Bagi Penulis

Menambah pengalaman peneliti dalam memahami secara mendalam prose implementasi aplikasi SAKTI dan perencanaan anggaran serta menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan keterampilan penelitian ilmiah.

- Bagi pembaca

Memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan aplikasi, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan pengguna serta menjadi bahan evaluasi dan pelatihan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aplikasi SAKTI

2.1.1 Definisi Aplikasi

Menurut Ilmiah et al.,(2015), aplikasi didefinisikan sebagai program jadi yang dikembangkan untuk melayani fungsi-fungsi eksternal seperti pengguna dan layanan aplikasi. Dalam perspektif komputasi, aplikasi berfungsi menyelesaikan masalah melalui penerapan Teknik pemrosesan data, baik yang melibatkan perhitungan tertentu maupun tanpa melalui proses pengolahan data yang dihasilkan. Sementara itu, kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan aplikasi sebagai penerapan sistem pengolahan data dalam suatu proyek dengan menggunakan kaidah pemrograman tertentu.

Menurut Abdurahman et al.,(2014), aplikasi merupakan sekumpulan perintah terstruktur yang dijalankan oleh program komputer khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Secara teknis, aplikasi menggunakan metode alur data dalam menganalisis informasi yang diperlukan untuk proses komputasi dan pengolahan data. Definisi umum aplikasi adalah perangkat bantu yang dapat disesuaikan penggunaannya dalam situasi tertentu, namun tetap relevan untuk penerapan secara umum. Dengan kata lain, aplikasi adalah alat komputer yang dioperasikan oleh pengguna untuk menyelesaikan berbagai tugas dan kebutuhan spesifik.

2.1.2 Definisi SAKTI

SAKTI merupakan sebuah terobosan dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut Kementerian Keuangan RI (2025), SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) adalah aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh satuan kerja pemerintah dalam mengelola seluruh proses keuangan negara secara digital, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaannya, hingga pembuatan laporan. SAKTI terdiri dari berbagai modul utama seperti perencanaan, pelaksanaan anggaran, komitmen, pembayaran, aset, persediaan, dan pelaporan keuangan yang saling terhubung dalam satu sistem terpadu. Tujuan utama pengembangan aplikasi SAKTI adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan sistem yang terintegrasi antara satuan kerja (Satker) dan DJPb, proses bisnis keuangan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Implementasi SAKTI juga mendukung Upaya transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan tata Kelola keuangan negara yang modern dan berstandar internasional.

Aplikasi SAKTI pertama kali diuji coba pada tahun 2015 dengan versi awal yang masih berbasis desktop, memerlukan instalasi terpisah di setiap computer dan hanya diterapkan di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Keuangan. Dalam Upaya meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi kerja, SAKTI kemudian dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web. Proses migrasi ini dilakukan secara

bertahap melalui beberapa fase uji coba hingga akhirnya diterapkan secara penuh pada tahun 2022 di seluruh Kementerian/Lembaga, berdasarkan landasan hukum PMK nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. Sebelum adanya SAKTI, aplikasi yang digunakan oleh satker sangat beragam, dengan installer dan database yang juga terpisah-pisah. Mulai dari aplikasi SAS, SAIBA, SILaBI, RKA K/L, SIMAK dan Persediaan, serta aplikasi pendukung lainnya seperti aplikasi pin ppspm, harus dimiliki oleh setiap satker untuk dapat mengelola APBN. Namun saat ini cukup satu aplikasi yaitu SAKTI, sudah dapat mengakomodir itu semua. Aplikasi-aplikasi tersebut terdapat pada modul-modul di SAKTI yaitu:

1. Modul Administrasi
2. Modul Referensi
3. Modul Sinkronisasi Renja-RKA
4. Modul Penganggaran
5. Modul Komitmen
6. Modul Bendahara
7. Modul Pembayaran
8. Modul Persediaan
9. Modul Aset Tetap
10. Modul Piutang
11. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Modul administrasi dan referensi tentunya modul awal dalam penggunaan aplikasi SAKTI. Pengelolaan pengguna, perekam pejabat perbendaharaan,

penanda tangan, aktivasi OTP dilakukan pada modul ini. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan APBN dengan menggunakan modul Renja-RKA serta modul penganggaran. Dalam pelaksanaan APBN digunakan modul komitmen, pembayaran dan bendahara. Modul komitmen digunakan untuk pengelolaan aktivitas terkait pencatatan data supplier, kontrak, dan berita acara serah terima (BAST). Kemudian dilanjutkan modul pembayaran untuk pengajuan pembayaran atas beban APBN, pengesahan pendapatan dan belanja, dan pencatatan surat pemerintah pencairan dana. Lalu modul bendahara untuk penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui bendahara. Sehubungan dengan pertanggungjawaban APBN digunakan modul persediaan, Aset tetap, piutang serta modul akuntansi dan pelaporan sebagai dasar atau data pokok dalam penyusunan laporan keuangan. Modul persediaan digunakan untuk penatausahaan, pengakuntasian, dan pelaporan barang persediaan. Modul aset tetap untuk penatausahaan dan pengakuntasian piutang penerimaan negara bukan pajak. Dan terakhir modul akuntansi dan pelaporan adalah bagian dari sakti yang berfungsi untuk pengintegrasian data jurnal dari semua modul SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

2.2 Konsep Dasar Akurasi Perencanaan Anggaran

2.2.1 Akurasi

menurut Mardiasmo (2018), akurasi perencanaan anggaran merupakan derajat kedekatan antara estimasi anggaran yang disusun pada awal periode dengan realisasi yang terjadi pada akhir periode, yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam melakukan prediksi keuangan yang tepat dan sesuai dengan

kebutuhan riil organisasi. Definisi ini mengandung makna yang mendalam dan kompleks. Pertama, akurasi bukan sekadar kesesuaian numerik, tetapi merupakan cerminan kapabilitas organisasi dalam memahami dinamika keuangannya sendiri. Kedua, akurasi mengindikasikan tingkat kedewasaan sistem perencanaan yang dimiliki organisasi. Ketiga, akurasi menunjukkan kemampuan prediktif organisasi dalam membaca berbagai variable yang mempengaruhi kondisi keuangan.

Menurut Halim (2019) mendefinisikan akurasi sebagai tingkat kesesuaian antara perencanaan anggaran dan implementasinya, yang diukur melalui varian anggaran yang minimal, baik pada komponen pendapatan maupun belanja, serta kesesuaian dengan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Perencanaan

Perencanaan merupakan proses fundamental dalam setiap kegiatan organisasi maupun pemerintah. Menurut George R. Terry (2017), perencanaan adalah pemilihan dan penghubungan fakta serta pembuatan dan penggunaan asumsi mengenai masa datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Khusus dalam pengelolaan keuangan negara, perencanaan diartikan sebagai proses penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Mardiasmo (2018), perencanaan anggaran negara merupakan instrument kebijakan fiskal yang strategis untuk mencapai tujuan Pembangunan nasional.

2.2.3 Anggaran

Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian keuangan yang vital dalam organisasi. Menurut Mulyadi (2016), anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Khusus untuk sektor pemerintah, Mardiasmo (2018) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran memiliki karakteristik utama bersifat komprehensif dengan mencakup seluruh aktivitas organisasi, menggunakan satuan moneter sebagai unit pengukuran, memiliki jangka waktu tertentu, berorientasi masa depan, dan berfungsi sebagai alat perencanaan sekaligus pengendalian.

2.2.4 Perencanaan anggaran

Perencanaan anggaran merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, merancang, dan mengalokasikan sumber daya keuangan guna mencapai tujuan organisasi. Mardiasmo (2018) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai target kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu, yang dinyatakan dalam satuan moneter, berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.

Agar efektif, perencanaan anggaran harus mematuhi prinsip-prinsip utama. Anggraeni, Erina, & Effendy (2020) menekankan pentingnya prinsip-prinsip anggaran publik, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan nilai value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) dalam pengelolaan keuangan organisasi publik.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul dan sedang berlangsung. Menurut Rusandi & Muhammad Rusli (2021), penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berkaitan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang melibatkan pengkajian peristiwa dan fenomena dalam kehidupan Masyarakat, dimana peneliti mengajak individu atau kelompok untuk berbagi pengalaman atau menceritakan kisah hidup mereka. Data yang diperoleh kemudian dipublikasikan dalam bentuk timeline yang rinci. Ciri khas dari pendekatan ini adalah data yang dihasilkan tidak berbentuk angka, melainkan berupa huruf dan gambar, berbeda dengan data yang diperoleh dalam penelitian kuantitatif.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu

Penelitian ini dilaksanakan saat kegiatan magang sesuai dengan prosedur, yaitu dari tanggal 28 Juli hingga 12 September 2025. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jadwal Polda Jawa Tengah, yang dimulai dari Senin hingga Jumat pukul 08.00-14.00.

3.2.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Polda Jawa Tengah, yang tepatnya di Jalan Pahlawan nomor 1, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan kode pos 50142. Polda Jawa Tengah adalah badan pelaksanaan utama kewilayahan yang berkedudukan dibawah Kapolda, tugasnya yaitu melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegakkan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku.

3.2.3 Objek penelitian

Pada kesempatan kali ini objek penelitian yaitu mengenai Optimalisasi Aplikasi Sakti Dalam Mendukung Akurasi Perencanaan dan Anggaran Pada Subbagrenmin Polda Jawa Tengah. Pihak yang akan dijadikan responden adalah Bapak Jefri, selaku staff bidang keuangan di subbagrenmin Polda Jawa Tengah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menerapkan pendekatan metode tertentu untuk Jenis penelitian ini berfungsi sebagai desain yang mengatur strategi pelaksanaan penelitian. Proses penelitian diimplementasikan dengan melakukan observasi, survey, serta kajian mendalam terhadap berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, artikel publikasi, situs web terpercaya, dan temuan studi sebelumnya yang relavan dengan topik penelitian. Berdasarkan integrasi berbagai sumber tersebut, kemudian dirumuskan kerangka teori yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

a. Observasi

Menurut Bogdan & Biklen dalam Ardiansyah et al., (2023), bahwa observasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap partisipan serta konteks yang terkait dengan fenomena penelitian. Dalam penelitian kualitatif, observasi dapat dilakukan baik pada situasi yang berlangsung secara alami maupun pada lingkungan yang telah disusun khusus untuk keperluan penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung berbagai perilaku, interaksi sosial, serta konteks yang mendukung pemahaman terhadap fenomena yang dikaji.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017), wawancara merupakan bentuk interaksi yang melibatkan dua orang untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab guna membangun pemahaman mengenai suatu topik. Teknik ini digunakan sebagai metode pengumpulan data, tidak hanya untuk mendapatkan Gambaran awal tentang permasalahan penelitian, tetapi juga untuk menelusuri informasi lebih lanjut secara mendalam dari responden.

c. Studi Pustaka

Metode studi Pustaka ialah Teknik pengumpulan data melalui berbagai macam sumber literatur yang relavan dengan topik penelitian penulis (Sumarni, 2021). Literatur yang relavan dengan penelitian penulis dapat berupa jurnal akademik, buku, serta berbagai macam catatan khusus.

BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

4.1.1 Sejarah Singkat Polda Jawa Tengah



Gambar 4. 1 Polda Jawa Tengah

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah dahulu bernama Komando Daerah Kepolisian RI di wilayah provinsi Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1, Semarang, Jawa Tengah dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yaitu Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo dan seorang Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) yaitu Brigjen Pol. Dr. Latif Usman, S.I.K., M.Hum. Sejarah perjuangan kepolisian daerah Jawa Tengah dari masa ke masa, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Berikut adalah liku-liku kepolisian daerah Jawa Tengah dari masa ke masa:

1. Periode pertama 17 Agustus 1945 – 17 Desember 1949, kepolisian Jawa Tengah berada di bawah naungan undang-undang dasar republic Indonesia 1945.

2. Periode kedua 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan undang-undang dasar sementara Republik Indonesia 1949
3. Periode ketiga 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959, kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan undang-undang dasar sementara Republik Indonesia 1950
4. Periode keempat 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966, periode peralihan atau menjelang orde baru.
5. Periode kelima 11 Maret 1966 reformasi, adalah periode pembaharuan dan kemajuan serta regenerasi kepolisian komando daerah kepolisian Jawa Tengah.

Polda Jawa Tengah terdiri dari beberapa kepolisian resort (Polres), antara lain:

Tabel 4.1 Kepolisian Resort (Polres)

1. Polrestabes Semarang	19. Polres Magelang Kota
2. Polresta Bayumas	20. Polres Pati
3. Polresta Surakarta	21. Polres Pekalongan
4. Polres Banjarnegara	22. Polres Pekalongan Kota
5. Polres Batang	23. Polres Pemasangan
6. Polres Blora	24. Polres Purbalingga
7. Polres Boyolali	25. Polres Purworejo
8. Polres Brebes	26. Polres Rembang
9. Polresta Cilacap	27. Polres Semarang

10. Polres Demak	28. Polres Sragen
11. Polres Grobogan	29. Polres Sukoharjo
12. Polres Jepara	30. Polres Polres Salatiga
13. Polres Karanganyar	31. Polres Tegal
14. Polres Kebumen	32. Polres Tegal Kota
15. Polres Kendal	33. Polres Temanggung
16. Polres Klaten	34. Polres Wonogiri
17. Polres Kudus	35. Polres Wonosobo
18. Polresta Magelang	

4.1.2 Visi dan Misi Kepolisian Daerah Jawa Tengah

a. Visi

Menampilkan Polda Jawa Tengah yang professional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan Masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban Masyarakat dan penegakkan hukum.

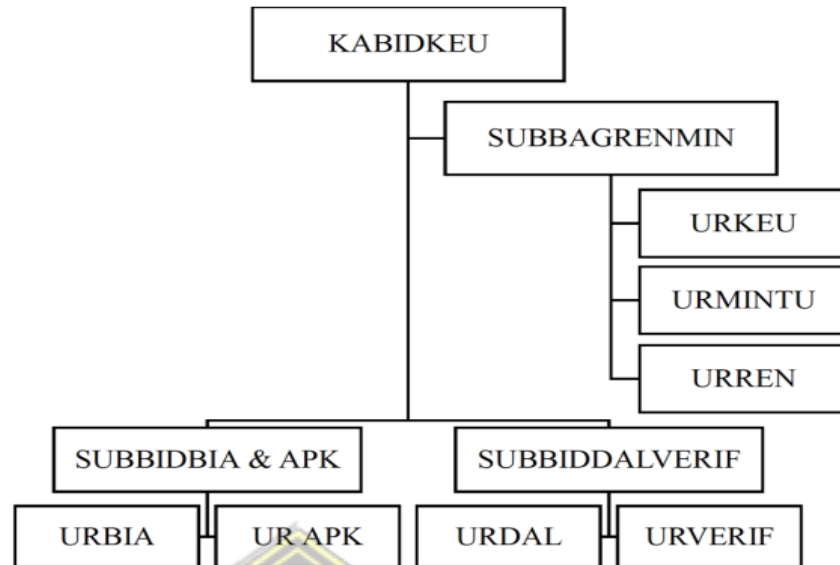
b. Misi

1. Meningkatkan sumber daya manusia kepolisian daerah jawa Tengah untuk tampil sebagai sosok pengayom, pelindung, dan pelayan Masyarakat.
2. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten, berkesinambungan dan transparan untuk pemeliharaan kamtibmas.

3. Melaksanakan pelayanan optimal, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi Masyarakat dalam Upaya meningkatkan kesadaran hukum.
4. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta Masyarakat dan instansi terkait secara aktif.
5. Mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas.
6. Mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas.

4.1.3 Struktur Organisasi Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Bidang Keuangan Polda Jawa Tengah dipimpin oleh kepala bidang keuangan yang membawahi langsung tiga sub satuan kerja. Sub satuan kerja bidang keuangan terdiri dari sub bagian perencanaan yang merupakan unsur pembantu pimpinan serta sub bidang pembiayaan dan APK dan sub bidang bagiab pengendalian keuangan sebagai unsur pelaksanaan tugas pokok. Setiap sub satuan kerja dikepalai oleh seorang kepala urusan (Kaur).



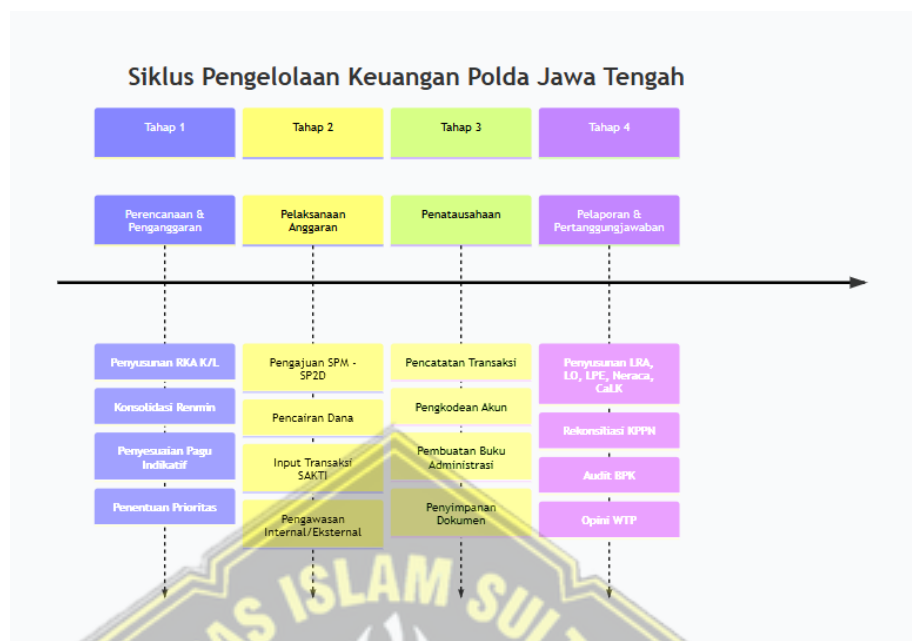
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bidang Keuangan

4.2 Hasil Pengamatan

Dalam Melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang keuangan, Subbagrenmin Polda Jawa Tengah memiliki pedoman internal dalam setiap prosesnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara bersama staff Subbagrenmin yang bernama Bapak Jefri, uraian berikut akan menyajikan secara rinci tentang tahapan perencanaan kerja dan anggaran, identifikasi kelebihan dan kelemahan penggunaan Aplikasi SAKTI, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Upaya optimalisasi Aplikasi SAKTI oleh Subbagrenmin Polda Jawa Tengah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Tahapan Perencanaan Kerja dan Anggaran



Gambar 4.3 Tahapan Perencanaan Kerja dan Anggaran

1. Perencanaan dan penganggaran: Menyatukan kebutuhan dengan alokasi

Proses perencanaan kerja dan anggaran di lingkungan Polda Jawa Tengah dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) oleh setiap satuan kerja berdasarkan prioritas kebutuhan operasional, yang diacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra Polri. Proses ini kemudian dikonsolidasikan oleh Subbag Renmin di masing-masing satker sebelum dikirim ke bagian keuangan untuk dikumpulkan dan disesuaikan dengan halaman indikatif dari pusat.

Keterlibatan berbagai unit dalam penyusunan anggaran menunjukkan prinsip partisipatif dan transparansi. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa keterbatasan alokasi sering kali menyebabkan beberapa program prioritas tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Ha ini memerlukan

efektivitas dalam menentukan kebutuhan dan urutan prioritas agar penganggaran bisa lebih akuntabel dan lebih responsive terhadap kebutuhan organisasi.

2. Pelaksanaan Anggaran: Kepatuhan dan Ketetapan Proses

Tahapan pelaksanaan anggaran adalah tahap penting dalam siklus pengelolaan uang negara, di mana rencana yang sudah dibuat dalam dokumen anggaran diubah menjadi Tindakan nyata. Di lingkungan Polda Jawa Tengah, proses ini meliputi beberapa Langkah administratif dan operasional yang harus dilakukan secara teratur pada kedisiplinan semua pihak yang terlibat serta sistem pengendalian internal yang cukup baik.

Setelah anggaran dialokasikan dan disetujui melalui DIPA, pelaksanaan keuangan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran. Masing-masing memastikan memiliki tugas sendiri-sendiri dalam menjamin bahwa anggaran yang dicairkan digunakan secara benar. Prosesnya dimulai dari perencanaan kegiatan hingga pengajuan dana melalui dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), yang kemudian diubah menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Semua transaksi yang dilakukan saat menggunakan anggaran harus didampingi oleh dokumen resmi yang lengkap. Contohnya, ketika melakukan kegiatan operasional seperti membeli inventaris barang, biaya perjalanan dinas, atau mengadakan pelatihan internal, setiap pengeluaran wajib

diperkuat dengan faktur, kuintansi, kontrak kerja, serta dokumen pendukung lainnya. Hal ini, menjadi dasar untuk pertanggungjawaban yang nantinya digunakan dalam pelaporan dan audit. Dalam penggunaan anggaran, ketaatan terhadap aturan menjadi prioritas utama. Semua transaksi harus mengikuti ketentuan hukum dan standar akuntansi pemerintah.

Di Polda Jawa Tengah, seluruh kegiatan anggaran diinput melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang terhubung dengan sistem SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang dimiliki Kementerian Keuangan. Dengan sistem ini, setiap transaksi dicatat secara langsung, terbuka, dan mudah dicari, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Bidang Keuangan (Bidkeu), Polda Jawa Tengah sebagai unit pengontrol keuangan, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi rutin dilakukan untuk menilai kapan anggaran dilaksanakan, sejauh mana sesuai rencana kerja, serta bagaimana efisiensi dan manfaat penggunaan dana tersebut.

Polda Jawa Tengah juga mewajibkan seluruh satuan kerja untuk memperhatikan aturan perpajakan dalam setiap transaksi keuangannya. Pajak yang timbul dari transaksi seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, maupun PPN harus dipungut dan disetorkan ke kas negara secara tepat waktu melalui sistem e-Billing. Ketidakpatuhan terhadap hal ini dapat menyebabkan audit opini yang

tidak baik dan menurunkan kepercayaan Masyarakat terhadap pengelolaan Lembaga keuangan. Namun, penerapan anggaran tetap mampu mengatasi beberapa tantangan, seperti keterlambatan cairnya dana karena perubahan DIPA, kendala teknis penggunaan aplikasi keuangan, serta kurangnya pemahaman sebagian personel terhadap prosedur administrasi keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan SDM, pelatihan teknis, serta koordinasi antar unit menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran. Melalui pemanfaatan sistem informasi keuangan yang semakin terpadu, serta peningkatan disiplin administrasi, pelaksanaan anggaran di Polda Jawa Tengah telah menunjukkan kemajuan di bidang akuntabilitas dan transparansi. Komitmen pemimpin dalam memastikan semua proses berhalan sesuai regulasi menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan bernilai tinggi.

3. Penatausahaan: Administrasi Keuangan yang Terstruktur

Penatausahaan keuangan adalah bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan anggaran karena terkait langsung dengan proses [encatatan, pengelompokkan, dan penyimpanan transaksi keuangan. Di Polda Jawa Tengah, penatausahaan dilakukan untuk menjaga administrasi kebersihan dan akuntabilitas, serta menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang benar, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penatausahaan mencakup seluruh aktivitas administrative yang dilakukan setelah amggaran dihabiskan. Di Polda jawa Tengah, aktivitas ini diatur oleh Bidang Keuangan (Bidkeu) Bersama Bendahara pengeluaran, Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), dan staf keuangan di masing-masing satuan kerja. Semua transaksi keuangan wajib dicatat dalam sistem SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dengan memperhatikan kode akun, jenis pengeluaran, dan sumber dana sesuai struktur APBN. Dokumen seperti SSP, kuintansi, invoice, kontrak, berita acara serah terima, dan surat perjalanan dinas harus disimpan dengan rapi sesuai aturan. Penyimpanan ini bisa dilakukan secara digital melalui modul dokumen elektronik di SAKTI maupun fisik untuk keperluan audit dan verifikasi. Dokumen yang disimpan menjadi bukti penting dalam proses pertanggungjawaban keuangan. Sebagai bagian dari administrasi keuangan, dibuat buku kas umum, buku pembantu kas, buku bank, dan rekapitulasi pengeluaran. Selain itu, juga dilakukan pencatatan utang dan pajak yang belum terbayar serta laporan saldo kas setiap bulan. Keakuratan dalam pencatatan sangat penting agar tidak terjadi perbedaan antara realisasi fisik dan catatan administrasi.

Dalam praktiknya, penatausahaan keuangan Polda Jawa Tengah mengikuti asas 4T, yang meliputi Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Waktu, dan Tertib Sasaran. Ini berarti seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan tepat waktu, sesuai aturan, pada pos anggaran yang benar, dan untuk tujuan yang sah secara hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin laporan keuangan yang berkualitas dan mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam proses ini, seperti keidaktepatan waktu pengumpulan dokumen, kurangnya pemahaman tentang pengkodean akun dan input data ke sistem, serta

keterbatasan SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, Bidkeu Polda Jawa Tengah rutin mengadakan pelatihan teknis pengelolaan keuangan, pendampingan penggunaan aplikasi SAKTI, dan peningkatan pemahaman keuangan bagi para pengelola anggaran di setiap satuan kerja. Dengan menerapkan penatausahaan yang rapi dan terorganisir, Polda Jawa Tengah dapat menciptakan sistem administrasi keuangan yang kuat dan jujur. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengelola dana secara baik, tetapi juga menunjukkan komitmen Polri dalam membangun kepercayaan Masyarakat melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan profesional.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Transparansi yang Terbuka

Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah Langkah terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Fungsi dari proses ini adalah untuk memeriksa seberapa sesuai penggunaan anggaran dengan aturan yang berlaku dan memastikan prinsip akuntabilitas serta transparansi bagi Masyarakat. Di lingkungan Polda Jawa Tengah, pelaporan keuangan dilakukan secara terstruktur dan sistematis melalui mekanisme pelaporan berjenjang. Proses ini didukung oleh informasi teknologi serta tata kelola yang mengacu pada peraturan pemerintah pusat. Pelaporan keuangan dilakukan oleh Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perbendaharaan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Laporan Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan-laporan tersebut disusun menggunakan aplikasi SAKTI yang terintegritas langsung ke sistem keuangan Kementerian Keuangan. Semua data transaksi yang sudah diurus akan otomatis membentuk laporan keuangan berdasarkan modul-modul di dalam sistem. Ketepatan waktu, kebenaran data, dan kesesuaian format menjadi aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan ini. Selain laporan internal, satuan kerja juga wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) serta melakukan rekonsiliasi data bulanan dengan KPPN. LPJ mencakup informasi lengkap tentang penerimaan dan pengeluaran uang, saldo kas akhir, serta bukti pengeluaran seperti kuitansi dan surat setoran pajak. Rekonsiliasi dilakukan untuk membandingkan catatan satuan kerja dengan sistem yang dikelola negara, agar tidak ada kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil audit.

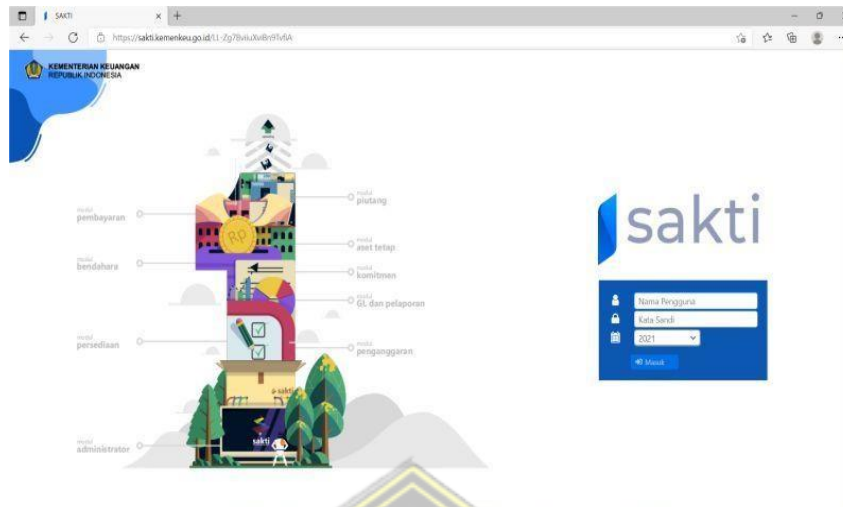
Namun, tantangan tetap ada, contohnya keterbatasan pengetahuan akuntansi di kalangan petugas keuangan, perubahan regulasi yang cepat, serta kebutuhan untuk terus memperbarui sistem informasi yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan terus-menerus dan peningkatan sistem pengendalian internal agar laporan dan tanggung jawab tetap memenuhi harapan reformasi birokrasi yang transparan dan modern.

4.3.2 Analisis Tahapan Perencanaan Kerja dan Anggaran dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Publik

Secara umum, prosedur pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Polda Jawa Tengah telah berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance, khususnya akuntabilitas dan transparansi. Dalam hasil pengamatan bahwa seluruh tahapan-tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaporan telah dilengkapi dengan sistem dan prosedur yang jelas. Namun, untuk mencapai tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih optimal, diperlukan penguatan pada beberapa aspek berikut:

1. Partisipasi dalam perencanaan: keterlibatan aktif seluruh unit kerja perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa perencanaan anggaran benar-benar merepresentasikan kebutuhan riil di lapangan.
2. Kapasitas SDM keuangan: diperlukan pelatihan yang berkelanjutan agar personel memiliki pemahaman yang memadai terhadap sistem informasi keuangan dan regulasi baru.
3. Digitalisasi pengawasan: sistem pengawasan perlu didukung oleh teknologi informasi untuk mempercepat proses audit dan tindak lanjutnya.

4.3.3 Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi SAKTI



Gambar 4. 4 Tampilan Awal Aplikasi SAKTI

Dari hasil pengamatan dan wawancara bersama staff Subbagrenmin yang bernama Bapak Jefri juga menunjukkan beberapa kelebihan dan kelemahan yang dimiliki dalam Aplikasi SAKTI ini sebagai berikut:

A. Kelebihan utama aplikasi SAKTI

Tabel 4. 2 Kelebihan Aplikasi SAKTI

Aspek	Kelebihan	Penjelasan
Integrasi & Efisiensi	Satu database terpusat & single entry point	Menggabungkan berbagai sistem (SAIBA, SAS, dll) menjadi satu. Data cukup diinput sekali dan dapat dipanggil oleh semua modul, menghilangkan duplikasi

Keamanan & Akuntabilitas	Kontrol akses berlapis dan audit trail	Menerapkan konsep MAKER, CHECKER, APPROVER, OTP untuk persetujuan transaksi, dan tracing jurnal untuk pelacakan lengkap
Aksesibilitas dan fleksibilitas	Berbasis web dan Multi-Device	Dapat diakses dari mana saja via browser tanpa instalansi, kompatibel dengan berbagai OS dan perangkat dengan spesifikasi minimal
Kualitas Laporan	Standar akuntansi pemerintah dan Real-time	Menggunakan basis akrual untuk laporan keuangan berkualitas dan konsolidasi data secara real-time
Penghematan biaya	Cloud-based dan paperless	Mengurangi kebutuhan server lokal dan mendukung efisiensi anggaran serta kerja tanpa kertas

B. Kelemahan utama aplikasi SAKTI

Tabel 4. 3 Kelemahan Aplikasi SAKTI

Aspek	Kelemahan/Tantangan	Penjelasan dan Dampak
Ketergantungan infrastruktur	Bergantung pada koneksi internet stabil	Menjadi kendala serius di daerah terpencil (remote area) dengan sinyal buruk
Beban server pusat	Loading lambat atau downtime	Beban server tinggi dapat menyebabkan akses lambat atau gangguan seperti yang pernah terjadi
Peubahan budaya kerja	Pergeseran dari sistem manual/offline	Membutuhkan adaptasi terhadap sistem terintegrasi dan prosedur online, termasuk persetujuan via OTP yang bisa rumit jika pejabat berwenang berada di Lokasi jauh
Efektivitas pelatihan	Pelatihan (training) kurang optimal	Pelatihan daring membuat peserta kurang focus, sementara pelatihan tatap muka seringkali terbatas kapasitas dan waktunya
Kesiapan SDM pengguna	Kompetensi dan jumlah SDM terbatas	Adaptasi sulit bagi pegawai dengan penguasaan teknologi rendah. Beban kerja

		menumpuk jika jumlah pegawai keuangan terbatas
Prosedur registrasi	Proses pendaftaran pengguna rumit	Banyak kesalahan format, pengisian data (NIK, email), dan penetapan peran, menyebabkan ratusan tiket permintaan bantuan

4.3.4 Analisis Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Optimalisasi Aplikasi SAKTI dalam Mendukung Akurasi

Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) guna mendukung akurasi pengelolaan keuangan di lingkungan Polda, terdapat sejumlah faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan kompetensi, kualitas data dan integrasi sistem, proses dan koordinasi internal, serta infrastruktur dan dukungan teknis. Masing-masing kategori memiliki faktor spesifik yang berpengaruh terhadap kelancaran dan ketepatan penggunaan aplikasi, terutama dalam konteks organisasi kepolisian yang memiliki karakteristik tersendiri.

1. Faktor SDM dan Kompetensi

Salah satu kendala utama terletak pada latar belakang petugas yang menangani SAKTI. Sebagian besar personel berasal dari unsur teknis kepolisian,

bukan dari latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang keuangan. Hal ini menyebabkan perlunya pemahaman khusus terkait pola anggaran institusi Polri, seperti mekanisme pembiayaan kegiatan operasional, perawatan aset, serta pendidikan dan pelatihan (diktur). Tanpa pemahaman yang memadai, risiko kesalahan dalam input data atau interpretasi aturan menjadi lebih tinggi.

Selain itu, tingginya frekuensi mutasi personel di lingkungan Polri turut memengaruhi kontinuitas pengelolaan SAKTI. Rotasi yang cepat dapat menyebabkan terjadinya *knowledge gap* apabila proses serah terima tidak dilakukan secara baik dan terdokumentasi. Ketidakjelasan prosedur yang ditinggalkan oleh petugas lama berpotensi mengganggu kelancaran operasional sistem dan mengurangi akurasi laporan keuangan. Oleh karena itu, dokumentasi prosedur dan pelatihan berkelanjutan menjadi krusial untuk menjaga konsistensi.

2. Kualitas Data dan Integrasi Sistem

Aspek kedua yang menjadi penghambat adalah kualitas data perencanaan dan integrasi dengan sistem internal lainnya. Dalam penyusunan anggaran kegiatan operasional kepolisian, dokumen perencanaan seperti Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus disusun secara detail dan realistis. Ketidakakuratan dalam dokumen ini dapat mengakibatkan revisi anggaran besar-besaran di kemudian hari, yang pada gilirannya mengganggu akurasi data dalam SAKTI.

Di samping itu, integrasi antara SAKTI dengan sistem internal yang masih digunakan di beberapa satuan kerja, misalnya untuk pengelolaan aset logistik,

menjadi tantangan tersendiri. Sinkronisasi yang masih dilakukan secara manual berisiko menimbulkan ketidakseragaman data, sehingga berpotensi menimbulkan selisih antara catatan di SAKTI dengan data riil di lapangan. Kondisi ini tentu berdampak pada keandalan informasi keuangan yang dihasilkan.

3. Proses dan Koordinasi Internal

Koordinasi internal yang kompleks juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Di lingkungan Polda, Subbagian Perencanaan dan Anggaran (Subbagren) harus berkoordinasi dengan berbagai unit lain untuk menyusun rencana dan anggaran yang selaras. Proses ini memerlukan komunikasi yang intensif agar setiap kegiatan yang diusulkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing unit. Apabila koordinasi tidak berjalan lancar, maka dokumen anggaran yang dihasilkan bisa tidak akurat atau tidak tepat waktu.

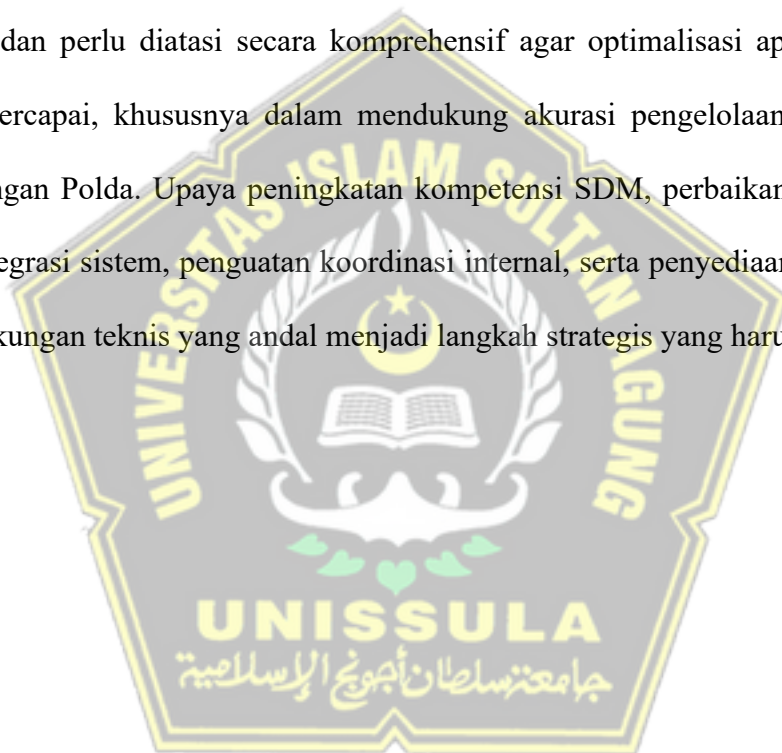
Selain koordinasi horizontal, koordinasi vertikal dengan Mabes Polri juga tidak kalah penting. Perencanaan anggaran harus mengacu pada petunjuk dan plafon anggaran yang ditetapkan oleh pusat. Ketidaksesuaian antara usulan daerah dengan kebijakan pusat dapat menyebabkan penundaan atau revisi yang berulang, yang pada akhirnya memengaruhi optimalisasi SAKTI sebagai alat perencanaan dan pelaporan.

4. Infrastruktur dan Dukungan Teknis

Faktor terakhir adalah ketersediaan infrastruktur pendukung dan dukungan teknis. Penggunaan SAKTI sangat bergantung pada ketersediaan perangkat komputer yang memadai, jaringan internet yang stabil, serta dukungan teknis

seperti *helpdesk* yang responsif. Di beberapa wilayah, terutama di lingkungan Polda yang tersebar, kendala teknis seperti gangguan jaringan atau keterbatasan perangkat keras dapat menghambat kelancaran input data dan akses informasi. Dukungan teknis yang lambat dalam merespons permasalahan juga berpotensi memperparah situasi, sehingga mengganggu akurasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dengan demikian, keempat kategori faktor penghambat tersebut saling terkait dan perlu diatasi secara komprehensif agar optimalisasi aplikasi SAKTI dapat tercapai, khususnya dalam mendukung akurasi pengelolaan keuangan di lingkungan Polda. Upaya peningkatan kompetensi SDM, perbaikan kualitas data dan integrasi sistem, penguatan koordinasi internal, serta penyediaan infrastruktur dan dukungan teknis yang andal menjadi langkah strategis yang harus ditempuh.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang dilakukan di Polda Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa setiap fase pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Keberadaan aplikasi SAKTI telah menjadi suatu kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengelolaan keuangan instansi tersebut.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, proses revisi anggaran yang kerap terlambat, serta keterbatasan akses public terhadap laporan keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan Upaya peningkatan kapasitas personel, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta perluasan peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran sebagai bagian dari pertanggungjawaban kolektif.

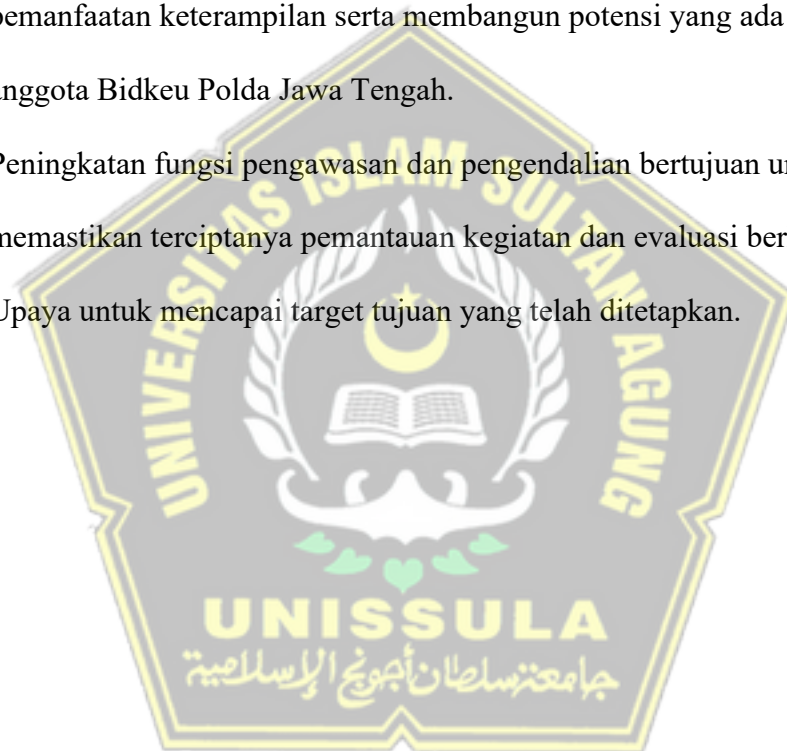
5.2 Keterbatasan

Selama observasi langsung di Subbag Renmin Polda Jawa Tengah, penulis menghadapi keterbatasan dalam penggunaan gadget untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data, mengingat banyak informasi keuangan instansi tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat diakses secara detail oleh pihak luar.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki keahlian khusus dalam penganggaran diperlukan, guna membangun sistem manajemen perencanaan yang lebih efektif.
2. Perlu diadakan program pelatihan berkelanjutan untuk memaksimalkan pemanfaatan keterampilan serta membangun potensi yang ada pada setiap anggota Bidkeu Polda Jawa Tengah.
3. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk memastikan terciptanya pemantauan kegiatan dan evaluasi berkala, sebagai Upaya untuk mencapai target tujuan yang telah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, H., Riswaya, A. R., & Id, A. (2014). APLIKASI PINJAMAN PEMBAYARAN SECARA KREDIT PADA BANK YUDHA BHAKTI STMIK Mardira Indonesia, Bandung Email: asepe_ririh@stmik-mi. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8(2), 61–69./
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *HSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- George, Terry R., & Rue, Leslie W. (2005). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Halim dan Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *SAKTI: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://www.djpb.kemenkeu.go.id/>.
- Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu. 2015. "Implementasi Anggaran berbasis kinerja." *Jurnal Kepolisian*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) <https://peraturan.jdih.kemenkeu.go.id/>.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Halim dan Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Keempat*.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurhadi, A., & Effendy, A.A. (2020). *Penganggaran Perusahaan*. Banten:
UNPAM Press.

Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif
Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan
Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

Sumarni, A. (2021). *Jurnal wawasan sarjana*. 1(1), 51-60.

